

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KOMITMEN ORGANISASI
TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE (Studi Kasus pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)**

Oleh :

M. Fajri Jalius

Pembimbing : M. Rasuli dan Al Azhar L

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

E-mail : fajrijalius@gmail.com

*The Effect of the Intern Control System, Local Financial Management and
Organization Commitment on the Implementation of Good Government
Governance (Case Study at the Local Device of Pekanbaru City)*

ABSTRACT

The study aimed to examine the effect of the intern control system, local financial management and organization commitment on the implementation of good government governance of local government in Pekanbaru City. It was a quantitative research utilizing a primary data which were obtained from questionnaire. The population of the study involved all units of local devices found in Pekanbaru city. The selection of the sample used purposive sampling methods with the characteristics of employees who perform the function of accounting / financial administrators, power users budget and budget users. There were about 96 respondents selected as the samples of the study, consisting of Chief SKPD, Secretary and Head of finance in each SKPD Pekanbaru City. The data were analyzed by using a multiple regression. The results of this study found that the intern control system, local financial management and organization management has positive significant effect on the implementation of good government governance with significant < 0.05 .

*Keyword: Intern Control System, Local Financial Management, Organization
Commitment and Good Government Governance*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah yang memiliki peranan yang terpenting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan-aturan, aspek

dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai sumber daya milik negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata. Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasi dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai

masalah termasuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena timbulnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sulitnya menjalankan penegakan hukum, monopoli dalam kegiatan perekonomian serta pelayanan terhadap publik yang kualitasnya memburuk (Ristanti et al., 2014).

Fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *good government governance* adalah masih terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia, sehingga semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan juga semakin banyaknya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2014, dijelaskan bahwa BPK memberikan opini WDP atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, BPK RI juga menemukan kelemahan pada sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: penyajian piutang pajak reklame tidak akurat, nilai piutang retribusi izin mendirikan bangunan tidak dapat diyakini kewajarannya, aset tetap Pemerintah Kota Pekanbaru Pada Neraca Per 31 Desember 2014 belum disajikan secara lengkap dan akurat, serta Tanah Hak Pengelolaan (HPL) belum tercatat pada Neraca Kota Pekanbaru (<http://bpkad.pekanbaru.go.id/>,

diakses pada 26 Juli 2016).

Selanjutnya BPK RI juga menemukan 5 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain: pemberian insentif pemungutan PPJU PLN tidak sesuai ketentuan, pemberian belanja subsidi kepada Trans Metro Pekanbaru tidak sesuai ketentuan, pengelolaan belanja hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan, rancangan peraturan daerah penyertaan modal pada enam BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru belum ditetapkan, dan yang terakhir terdapat 27 unit kendaraan dinas dan 18 laptop senilai Rp6.632.985.680,70 belum dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru (<http://bpkad.pekanbaru.go.id/>, diakses pada 26 Juli 2016).

Banyak faktor yang mempengaruhi penerapan *good government governance* pada implementasinya di dalam pemerintahan daerah, yaitu sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi penerapan *good government governance* adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan

keuangan pemerintah.

Selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2009:208).

Faktor kedua yang menentukan keberhasilan dari penerapan *good government governance* di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *good government governance* apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan (dari tahap perencanaan hingga pelaporan) pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan. Apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut telah baik dalam prosesnya maka akan mempunyai dampak

langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good government governance*.

Selanjutnya faktor ketiga yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus ditunjang dengan komitmen seseorang terhadap organisasinya. Komitmen organisasi menurut Robbins (2009:100) yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan seseorang yang tinggi dalam suatu pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru? 2) Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru? 3) Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan *good*

government governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 2) Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 3) Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good government governance* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Government Governance

Secara teoritis, *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak perilakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo, 2007:25). Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Dalam menerapkan *good governance* yang baik, harus diimbangi dengan penerapan *good government* yang baik pula. Tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang harus ditekankan, pemerintah juga harus berlaku yang baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan rakyat, agar pemerintahan berjalan dengan baik, berdaya guna dan juga berhasil. Oleh karena itu prinsip-prinsip dari *good governance* tersebut sangatlah penting dan juga harus diimbangi dengan *good government* yang baik

pula.

Didalam lampiran PermenPAN No. 13 tahun 2009 *good government governance* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapa pun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang dapat disebut lebih atau semakin baik jika tidak ada bukti bahwa pelayanan publik semakin baik dan semakin berkualitas.

Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Armando (2013) unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Risiko.
3. Kegiatan Pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi.
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai tujuan yang

harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai tersebut adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah yang dimulai dari penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD sampai pengelolaan kas umum daerah.

Halim (2012:30), mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (*accountability*), maksudnya pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, maksudnya keuangan

daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan.

3. Kejujuran, maksudnya urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, maksudnya program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat.
5. Pengendalian, maksudnya aparat pengawasan harus melakukan pengendalian agar tujuan dapat tercapai.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins, 2009:100). Robbins (2009:101) mengemukakan bahwa terdapat 3 komponen model dari komitmen organisasi, diantaranya adalah:

1. *Affective Commitment*.
2. *Continuance Commitment*.
3. *Normative Commitment*.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Pengendalian intern dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif

maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan pada peraturan (Mardiasmo, 2009:208).

Jadi bisa dikatakan jika sistem pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan baik akan memberikan efisien dan efektif dalam operasi, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibangun hipotesis:

H₁: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada SKPD Kota Pekanbaru.

b. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Menurut Halim (2008:30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Di dalam perancangan APBD pemerintah juga mendorong supaya masyarakat ikut berpartisipasi di dalam penyusunan APBD tersebut, dan kegiatan itu dinamakan musrenbang. Dan hal ini sudah termasuk ke dalam *good government governance*, dimana pemerintahan yang baik itu haruslah memasukkan partisipasi masyarakatnya ke dalam APBD yang akan dirancang. Berdasarkan uraian diatas maka

dapat dibangun hipotesis:

H₂: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada SKPD Kota Pekanbaru.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Menurut Robbins (2009:100) komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Dalam menjalankan komitmen organisasi, karyawan harus memiliki keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi.

Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah sasaran terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good government governance*. Dari uraian diatas didapat hipotesa ketiga yaitu:

H₃: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan *Good Government Governance* pada SKPD Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Responden dalam

penelitian ini yaitu Kepala SKPD, Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan di masing-masing SKPD dimana responden ini berperan langsung sebagai agen dalam mewujudkan *good government governance* melalui pengelolaan keuangan dan kinerja responden tersebut dalam mengelola pemerintahan mencapai visi, misi dan tujuan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 orang yang didapat dari 32 SKPD yang ada dan masing-masing SKPD ada 3 responden.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari Kepala SKPD, Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan SKPD di Kota Pekanbaru dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuisisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan *good government governance* (Y). Sedangkan variabel independennya adalah sistem pengendalian intern (X_1), pengelolaan keuangan daerah (X_2) dan komitmen organisasi (X_3).

Good government governance merupakan suatu tata kelola pemerintah yang baik, yang bertujuan untuk mensejahterakan

masyarakat yang ada di dalam pemerintahan tersebut (Syafrión, 2015). Pengukuran variabel penerapan *good government governance* dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: skala (1) menunjukkan Sangat Setuju, skala (2) menunjukkan Setuju, skala (3) menunjukkan Ragu-Ragu, skala (4) menunjukkan Tidak Setuju dan skala (5) menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang diambil dari Skripsi Syafrión (2015). Instrumen yang digunakan terdiri dari 13 (tiga belas) item pernyataan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah (PP No. 8 Tahun 2006). Pengukuran variabel sistem pengendalian intern dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: skala (1) menunjukkan Sangat Setuju, skala (2) menunjukkan Setuju, skala (3) menunjukkan Ragu-Ragu, skala (4) menunjukkan Tidak Setuju dan skala (5) menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner yang diambil dari Skripsi Syafrión (2015). Instrumen yang digunakan terdiri dari 22 (dua puluh dua) item pernyataan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengukuran variabel pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: skala (1) menunjukkan Sangat Setuju, skala (2) menunjukkan Setuju, skala (3) menunjukkan Ragu-Ragu, skala (4) menunjukkan Tidak Setuju dan skala (5) menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diambil dari Skripsi Syafrion (2015). Instrumen yang digunakan terdiri dari 10 (sepuluh) item pernyataan.

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut (Robbins, 2009:100). Pengukuran variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: skala (1) menunjukkan Sangat Setuju, skala (2) menunjukkan Setuju, skala (3) menunjukkan Ragu-Ragu, skala (4) menunjukkan Tidak Setuju dan skala (5) menunjukkan Sangat Tidak Setuju. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diambil dari Skripsi Syafrion (2015). Instrumen yang digunakan terdiri dari 12 (dua belas) item pernyataan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pernyataan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} diperoleh dengan persamaan $N-2 = 75-2 = 73 = 0.2272$. Tingkat signifikansi 5%, maka didapat $r_{tabel} 0.2272$. Setiap butir pernyataan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai positif, maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53).

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0.7 (Ghozali, 2013:48). Nilai reliabilitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis
Penerapan <i>Good Government Governance</i>	0.929	0.7
Sistem Pengendalian Intern	0.972	0.7
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.912	0.7
Komitmen Organisasi	0.970	0.7

Sumber : Data Olahan, 2016

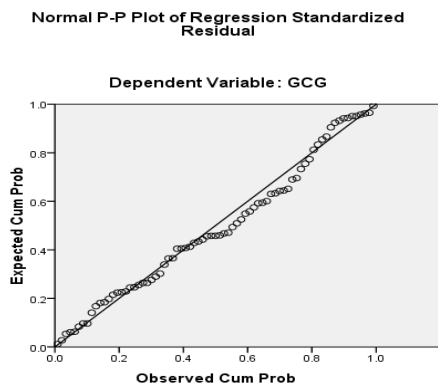
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen penerapan *good government governance*, sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi antara lain 0.929, 0.972, 0.912 dan 0.970. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0.7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized*. Berikut gambar yang menunjukkan model regresi dengan menggunakan grafik P- Plot:

Gambar 1
Normal Probability Standardized Residual



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tampilan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Grafik dalam gambar ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Pengendalian Intern	0.332	3.010	Tidak Terdapat Multikolonieritas
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.631	1.586	Tidak Terdapat Multikolonieritas
Komitmen Organisasi	0.281	3.558	Tidak Terdapat Multikolonieritas

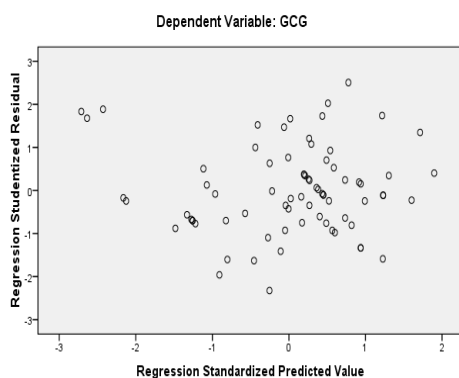
Sumber : Data Olahan, 2016

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian

menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:105).

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

d. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini

ditunjukkan nilai Durbin Watson pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

N	dU	dL	Durbin-Watson	Keterangan
75	1.709	1.543	2.178	Bebas Autokorelasi

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel di atas hasil Durbin Watson menunjukkan angka 2.178. Nilai dU dengan $k = 3$ dan $n = 75$ menunjukkan angka 1.709 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dimana $dU < d < (4-dU) = 1.709 < 2.178 < 2.291$.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen dan begitu juga sebaliknya. Hasil dari nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.885 ^a	0.783	0.774	3.454

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel 4, diketahui nilai Adjusted R Square

sebesar 0.774. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 77.4 %. Sedangkan sisanya 22.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0.05). Apabila sig t lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:40).

Nilai t_{tabel} pada penelitian ini dapat dicari dengan $\alpha = 5\%$ dibagi 2 = 2.5%. Sedangkan derajat bebas pengujian adalah $n-k-1 = 75-3-1 = 71$. Jadi dengan melihat tabel t maka t_{tabel} nya sebesar 1.994.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t untuk masing-masing variabel independen (sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi) terhadap

variabel dependen (*good government governance*):

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan *good government governance*. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Sistem Pengendalian Intern	4.715	1.994	0.000

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.715 > 1.994$ dan $sig. 0.000 < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance* pemerintahan daerah Kota Pekanbaru. Ini berarti bahwa sistem pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan penerapan *good government governance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusniyar et al. (2016) dan Wiratno (2013) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ruspina (2013), yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern

tidak berpengaruh terhadap penerapan *good government governance*.

b. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan *good government governance*. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Pengelolaan Keuangan Daerah	4.383	1.994	0.000

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.383 > 1.994$ dan $sig. 0.000 < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tabel 6 tersebut, membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance* terhadap pemerintahan daerah Kota Pekanbaru. Ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik, relevan dan transparan tentunya diharapkan dapat meningkatkan penerapan *good government governance*. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Ristanti et al. (2014) dan Ruspina (2013), yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*.

c. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan *good government governance*. Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Variabel Independen	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Komitmen Organisasi	2.434	1.994	0.017

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.434 > 1.994$ dan $sig. 0.017 < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian yang ada pada tabel 7 tersebut, membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance* pemerintahan daerah Kota Pekanbaru. Ini berarti bahwa komitmen organisasi yang baik dapat meningkatkan penerapan *good government governance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Wiratno (2013) dan Ristanti et al. (2014) yang menemukan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan *good government governance*. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Yusniyar et al. (2016) dan Wiratno (2013). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ruspina (2013), yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap penerapan *good government governance*.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Ruspina (2013) dan Ristanti et al. (2014). Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*.
3. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Wiratno (2013) dan Ristanti et

al. (2014) yang menemukan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good government governance*.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian antara lain:

1. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian apabila penelitian dilakukan menambah atau mengganti pada objek dan daerah penelitian yang berbeda.
2. Pemahaman dan keseriusan dari responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang kurang dalam menjawab semua pernyataan-pernyataan.
3. Variabel independen yang digunakan terbatas pada sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi.

Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya dengan menggunakan sampel SKPD yang ada di beberapa kabupaten atau kota.
2. Penelitian selanjutnya agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan *good government governance* (misalnya

- pengawasan DPRD, auditor internal, dan sebagainya).
3. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi.
 4. Melengkapi metode dengan wawancara karena peneliti menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pernyataan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Gerry, 2013, *Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Tanah Datar)*, Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Ghozali, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*.
- Halim, Abdul, 2012, *Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 3, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, 2008, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2007, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- _____, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Ristanti, Ni Made Asih, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana, 2014, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)*, e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge, 2009, *Perilaku Organisasi*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Ruspina, Depi Oktia, 2013, *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Padang)*, Jurnal Universitas Negeri Padang, Padang.
- Sopiah, 2008, *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafrion, Fandra Yovano, 2015, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern,*

Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok), Skripsi, Universitas Riau.

Wiratno, Adi, Umi Pratiwi dan Nurhikmah, 2013, *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja (Survey Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal)*, Jurnal Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Yusniyar, Darwanis dan Syukriy Abdullah, 2016, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh)*, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 5 No. 2 Mei 2016: 100-115.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (www.google.com, diakses pada 2 Agustus 2016).

_____. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.

_____. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (www.google.com, diakses pada 2 Agustus 2016).

_____. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (www.google.com, diakses pada 2 Agustus 2016).

<http://bpkad.pekanbaru.go.id/>
(diakses pada 26 Juli 2016).